

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian telah memberikan sumbangan yang nyata dalam perekonomian nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, dan menyeimbangkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Sebagai sektor ekonomi, pertanian mempunyai fungsi yaitu: menghasilkan bahan pangan, pakan, agroindustri dan bioenergi; meningkatkan kapabilitas petani dan keluarganya; menghasilkan devisa, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, serta membantu menjaga keseimbangan lingkungan dengan praktek usahatani yang ramah lingkungan. (Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2014 : 1).

Sektor pertanian terbagi ke dalam beberapa subsektor. Salah satunya adalah subsektor tanaman perkebunan. Komoditas perkebunan mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan dan banyak diperlukan oleh pasar domestik dan pasar internasional. Perkebunan sebagai sektor andalan perekonomian Indonesia tidak lepas dari permasalahan yang harus dihadapi antara lain masih rendahnya kualitas hasil (produk) yang diperoleh dari usaha perkebunan, baik itu produk primer maupun produk sekunder. Kualitas produk primer yang kurang baik akan berdampak pada kualitas hasil pengolahan sekundernya. Hal ini dapat mengakibatkan permasalahan dalam pemasaran produk komoditas perkebunan. Rendahnya mutu selain karena pengaruh perlakuan budidaya, juga karena penanganan pascapanen yang belum diterapkan sesuai standar. Kegiatan penanganan pascapanen tanaman perkebunan di tingkat petani umumnya masih dilakukan secara tradisional dan menggunakan alat yang sederhana, dan diperparah lagi dengan panen yang dilakukan tidak tepat waktu sehingga mempengaruhi mutu hasil (Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, 2014 : 1).

Indonesia merupakan salah satu negara pembudidaya tanaman kakao paling luas di dunia dan termasuk negara penghasil kakao terbesar ketiga setelah Ivory Coast dan Ghana, yakni dengan nilai produksi tahunannya mencapai 572

ribu ton. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan (2006), pada tahun 2003 luas areal penanaman kakao telah mencapai 917 ribu hektar dan terbesar di seluruh provinsi, kecuali DKI Jakarta. Kakao Indonesia, khususnya yang dihasilkan oleh rakyat, dipasaran internasional masih dihargai paling rendah karena citranya yang kurang baik, yakni didominasi oleh biji-bijian dengan kadar kotoran tinggi, serta terkontaminasi serangga, Jamur, atau mikotoksin. Selain itu, cita rasanya pun lemah. Hal ini berdampak pada penerapan diskon terhadap kakao Indonesia. (Wahyudi, 2009 : 13)

Kakao merupakan salah satu komoditas ekspor yang berkontribusi penting dalam pemasukan devisa Indonesia. Situasi perdagangan kakao yang seringkali mengalami defisit menyebabkan harga kakao dunia relatif stabil pada tingkat yang tinggi. Kondisi ini merupakan peluang yang baik bagi Indonesia sebagai produsen kakao terbesar ketiga di dunia. Meskipun sebagai produsen kakao terbesar ketiga dunia, perdagangan ekspor Indonesia ke luar negeri relatif masih kecil. Total produksi kakao Indonesia sekitar 16 persen dari total produksi dunia, namun jumlah yang diekspor masih kurang dari 5 persen. Selain itu produsen di Indonesia masih mempunyai posisi tawar yang lemah ditunjukkan oleh harga kakao yang mudah berfluktuasi pada tingkat yang rendah (Wahyudi, 2009 : 17)

Beberapa permasalahan yang menghambat produksi kakao Indonesia antara lain adalah umur tanaman kakao yang sudah tua (lebih dari 25 tahun); beban pajak ekspor kakao olahan yang relatif tinggi yaitu sebesar 30 persen. Padahal tarif impor produk olahan kakao hanya sebesar 5 persen. Hal ini tidak mendorong perkembangan jumlah pabrik olahan kakao di Indonesia, sehingga pedagang lebih menyukai mengekspor kakao dalam bentuk biji non olahan. Permasalahan lainnya adalah serangan hama penggerek buah (PBK) serta masih buruknya penanganan pasca panen ikut memberikan andil terhadap rendahnya produktivitas kakao Indonesia. Sekitar 85 persen produk kakao Indonesia tidak difermentasi sehingga ekspor kakao Indonesia ke beberapa negara potensial seperti Uni Eropa masih terbatas, karena mengimpor produk kakao olahan yang belum difermentasi (Wahyudi, 2009 : 17)

Produksi biji kakao Indonesia secara signifikan memang terus meningkat tetapi tidak demikian dengan kualitas biji kakao tersebut. Mutu yang dihasilkan

mengalami penurunan dan beragam, antara lain kurang terfermentasi, tidak cukup kering, ukuran biji tidak seragam, kadar kulit tinggi, keasaman tinggi, cita rasa sangat beragam, dan tidak konsisten. Akibatnya harga biji kakao Indonesia relatif rendah dan dikenakan potongan harga dibandingkan dengan harga biji kakao dari negara produsen lain. Kualitas biji kakao Indonesia di mata internasional dianggap sangat rendah karena ketika diekspor tidak difermentasi terlebih dahulu. Akibatnya, aroma yang dihasilkan tidak baik dan kandungan lemaknya rendah, kandungan kotorannya di atas empat persen. Sesuai standar internasional, kandungan kotoran maksimal dua persen. Rendahnya kualitas biji kakao tersebut antara lain karena umur tanaman kakao di Indonesia sudah berusia lebih 17 tahun sehingga produktivitas menurun. Selain itu, hama penggerek buah kakao sejak tahun 1995 sampai saat ini belum dapat diberantas. Hal tersebut dikarenakan umur tanaman sangat mempengaruhi jumlah buah yang dapat dihasilkan tanaman (Kurniawan 2013 : 4).

Kakao merupakan salah satu komoditas yang diperdagangkan di lantai bursa komoditi Indonesia. Diharapkan Indonesia tidak hanya bertindak sebagai *price taker* dalam perdagangan global. Sampai saat ini bursa komoditi di Indonesia masih menghadapi kendala mendasar yaitu harga komoditas masih mengacu pada harga transaksi di bursa luar negeri. Sebagai contoh harga CPO masih mengacu kepada Malaysia; harga timah mengacu ke Singapura; harga kopi mengikuti harga di London. Harga kakao masih ditentukan oleh bursa komoditi New York (Wahyudi, 2009 : 20)

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun internasional yang dinamis sehingga menuntut produk pertanian yang mampu berdaya saing di pasar global. Untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian Indonesia, maka dibutuhkan efisiensi dalam sistem produksi, pengolahan dan pengendalian mutu serta kesinambungan produk. Dengan peningkatan daya saing, disertai upaya promosi dan pemasaran, maka ditargetkan surplus neraca perdagangan meningkat dari US\$ 24,33 milyar pada tahun 2010 menjadi US\$ 54,51 milyar pada tahun 2014 (Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2011 : 3).

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Ditjen PPHP) sebagai salah satu unit kerja eselon I di bawah Kementerian Pertanian telah memberikan sumbangannya di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian antara lain penurunan tingkat kehilangan (*losses*) dan peningkatan rendemen hasil pertanian, perbaikan mutu dan nilai tambah produk pertanian, pengembangan jaringan pemasaran dan pemberdayaan petani dalam pemasaran, stabilisasi harga dan pasokan, serta peningkatan ekspor dan pengendalian impor hasil pertanian. Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 9 dan 10 Tahun 2005, yang mencantumkan perubahan nomenklatur untuk organisasi yang menangani masalah pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yaitu Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dengan tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

Pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian adalah pembangunan sistem dan usaha-usaha dibidang pengolahan hasil pertanian yang meliputi kegiatan-kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan untuk memproses produk segar, menjadi produk setengah jadi, produk jadi dan produk samping/ ikutan serta pengembangan mutu dan pemasarannya, baik pasar domestik maupun pasar internasional. (Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2009 : 1).

Manfaat yang dapat diperoleh melalui pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian adalah: 1) terciptanya wawasan agribisnis dan budaya industri pada masyarakat; 2) berkembangnya kegiatan subsistem agribisnis hilir berupa aktifitas-aktifitas pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan jasa; 3) tumbuhnya industri-industri di pedesaan; 4) berkembangnya investasi di perdesaan; 5) meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah; 6) bertambahnya lapangan kerja baru; 7) meningkatnya perolehan devisa bagi negara; serta 8) berkurangnya arus urbanisasi. Membangun sistem dan usaha-usaha dibidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian membutuhkan program dan koordinasi baik di tingkat nasional dan daerah (Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2009 : 1).

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah penghasil kakao, dengan luas tanaman sebesar 149.787 Ha pada tahun 2014. Produksi rata-rata sebanyak 81,044 ton (Lampiran 1). Pemerintahan Sumatera Barat telah mengembangkan kakao secara besar besaran dan bertekad menjadikan Sumatera Barat sebagai sentra produksi kakao di Kawasan Indonesia Barat (KIB), hal ini telah dicanangkan oleh wakil presiden RI pada tahun 2006 di Kabupaten Padang Pariaman. Perkebunan kakao terbesar di Indonesia ada di Payakumbuh. Produksi kakao Sumatera barat menyumbang 28,8 persen dari produksi di Sumatera dan 6,3 persen produksi nasional. Pesatnya perkembangan luas kebun kakao di Sumatera Barat tidak terlepas dari tingginya keinginan/minat masyarakat juga kondisi agroekosistem yang cocok untuk pertumbuhan tanaman kakao serta harga produksinya yang menarik.

Dalam rangka meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian difokuskan pada pengembangan produk pertanian strategis yang berorientasi ekspor dalam bentuk segar dan olahan, melalui sertifikasi; meningkatkan jumlah skala industri hilir pertanian; meningkatkan nilai tambah produk; mensubstitusi impor tepung dan susu, penerapan SNI cocoa bean; peningkatan ekspor. Untuk mencapai target-target tersebut dilaksanakan melalui 8 Program dan 28 Kegiatan. (Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2011 : 201).

Untuk meningkatkan kualitas dan mutu kakao yang dihasilkan oleh petani, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Dirjen P2HP), Kementerian Pertanian melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengadakan sebuah Program Peningkatan Nilai Tambah Sektor Perkebunan, yakni Unit Pengolahan Hasil Fermentasi Kakao.

Salah satu bentuk upaya pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengembangan agroindustri di daerah pedesaan didorong oleh inovasi teknologi yaitu melalui Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) Unit Pengolahan Hasil Fermentasi Kakao di Provinsi Sumatera Barat. Program ini berlangsung mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 untuk periode tiga tahun pertama, untuk selanjutnya akan disempurnakan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Kepala Bidang PPHP Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat menyatakan sebanyak sepuluh kelompok di Sumatera Barat dijadikan percontohan untuk pengembangan kakao fermentasi. Sepuluh kelompok tersebut tersebar di beberapa kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat yaitu : dua kelompok di kota Padang, empat di Tanah Datar, dan empat di Padang Pariaman. Adapun program Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) Unit Pengolahan Hasil Fermentasi Kakao tersebut proses pelaksanaannya disesuaikan dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dapat dilihat pada lampiran 6.

B. Rumusan Masalah

Kota Padang merupakan salah satu lokasi Program Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian yaitu di kelurahan Indarung dan kelurahan Balai Gadang. Pada tahun 2012 di kelurahan tersebut terpilih dua kelompok tani sebagai lokasi basis pelaksanaan program Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) dan salah satunya adalah Kelompok Tani Saiyo yang menjadi pilihan lokasi penelitian penulis.

Program Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) salah satunya yaitu Unit Pengolahan Hasil (UPH) fermentasi kakao adalah industri pengolahan hasil pertanian skala kecil dan rumah tangga yang berbasis di perdesaan. Unit Pengolahan Hasil (UPH) fermentasi kakao merupakan program terobosan dalam mempercepat penumbuhan pendapatan masyarakat petani dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sebagai program terobosan, Unit Pengolahan Hasil (UPH) fermentasi kakao dikembangkan dengan mengacu pada skala usaha yang ekonomis, sehingga fungsi pelayanan dapat berkembang ke arah peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi untuk memasok permintaan pasar. (Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2011 : 6).

Program Peningkatan Nilai Tambah Sektor Perkebunan yaitu Unit Pengolahan Hasil (UPH) fermentasi kakao merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Program Pengembangan Fermentasi Kakao ini merupakan serangkaian dari kegiatan-kegiatan yang terintegrasi dari pasca panen hingga pemasaran hasil. Salah satu bentuk kegiatan dari Program Peningkatan

Nilai Tambah Sektor Perkebunan yaitu Unit Pengolahan Hasil (UPH) fermentasi kakao. Unit Pengolahan Hasil (UPH) fermentasi kakao adalah Kegiatan Pengembangan Agroindustri Pedesaan, Sub Kegiatan Pengembangan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan yang diwujudkan dalam pemberian bantuan berupa pemanfaatan dana bantuan sosial untuk pengadaan alat dan sarana penanganan mutu kakao fermentasi.

Mekanisme pemberian bantuan Program Peningkatan Nilai Tambah Sektor Perkebunan yaitu Unit Pengolahan Hasil (UPH) fermentasi kakao adalah pemberian bantuan berupa pemanfaatan dana bantuan sosial untuk pengadaan alat dan sarana penanganan mutu kakao fermentasi. Pemberian bantuan sosial ini diberikan pada kelompok tani kakao yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian Pertanian. Tujuan utama dari Program Unit Pengolahan Hasil (UPH) fermentasi kakao adalah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekspor produk pertanian dan untuk meningkatkan mutu dan kualitas kakao fermentasi yang dihasilkan oleh anggota kelompok tani penerima bantuan, sehingga pendapatan kesejahteraan anggota kelompok tani penerima bantuan dapat meningkat.

Di Kelompok Tani Saiyo, periode Pelaksanaan Program Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) Unit Pengolahan Hasil (UPH) fermentasi kakao dilaksanakan pada bulan juli 2012 dan berakhirnya pelaksanaan program PPHP Unit Pengolahan Hasil fermentasi kakao yaitu pada bulan desember 2013. Adapun bantuan yang diberikan pada kelompok tani penerima bantuan adalah dana bantuan sosial sebesar Rp.121.650.000 terdiri dari pembelian alat dan mesin pengolahan buah kakao sebesar Rp.111.150.000 dan pembelian bahan material dan insentif pekerja bangunan gudang alat sebesar Rp. 10.500.000 (Lampiran 2). Dari hasil survei pendahuluan, Pelaksanaan Program Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) ini dimulai dari pemungutan buah/ pengumpulan biji kakao segar, pengolahan buah sampai pemasaran biji kakao yang telah siap difermentasikan. Dalam pelaksanaan program masih terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Kelompok Tani Saiyo yaitu mesin pengolahan biji kakao yang ada berkapasitas besar, sehingga untuk mengolah biji basah yang akan difermentasikan menjadi biji kering harus menyediakan 750 kg biji kakao

basah. Kegiatan usaha tani kakao yang dilakukan oleh Kelompok Tani Saiyo yaitu mengumpulkan 160 kg biji kakao basah untuk di masukkan kedalam 1 kotak fermentasi kakao. Biasanya 1 kg biji kakao basah difermentasikan menghasilkan 350 gram biji kakao kering dengan waktu fermentasi 4 – 5 hari. Sehingga dari 160 kg biji kakao basah diperoleh 56 kg biji kakao kering dari hasil fermentasi. Untuk mengumpulkan 160 kg kakao segar dari Kelompok Tani Saiyo saja tidak cukup sehingga petani terpaksa membeli buah kakao segar kepada masyarakat dengan harga 1 kg buah kakao seharga Rp. 1700/kg.

Permasalahan yang terjadi juga terlihat dari perbedaan harga saat dijual ke pedagang. Harga kakao fermentasi adalah Rp.30.000/kg sementara harga kakao non fermentasi yaitu Rp.29.000/kg. dari perbedaan harga yang kecil membuat petani kurang berminat untuk memfermentasikan biji kakao segar. Sehingga pengembangan fermentasi kakao terkendala dengan tipisnya atau tidak adanya insentif harga untuk biji kakao fermentasi. Perbedaan harga inilah yang mempengaruhi eksistensi kelompok tani dalam menjalankan Program Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) Unit Pengolahan Hasil fermentasi kakao tersebut sehingga mempengaruhi ketidak aktifan Kelompok Tani Saiyo tersebut. Disamping itu, kendala yang dihadapi Kelompok Tani Saiyo juga terjadi dalam hal pemasaran, petani kesulitan dalam menegosiasi harga karena petani hanya sebagai *price taker* sedangkan eksportir/ pedagang berperan sebagai *price maker* sehingga petani sulit menghasilkan keuntungan. Para eksportir tidak membantu petani dalam kerja sama harga. Eksportir baru mau menaikkan harga jika petani sanggup menyediakan 50 ton fermentasi kakao/ bulan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis melakukan penelitian tentang **“Analisa Pelaksanaan Program Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) Unit Pengolahan Hasil Fermentasi Kakao (Studi Kasus : Kelompok Tani Saiyo Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang)** “. Maka dapat dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu :

- 1) Bagaimana profil Kelompok Tani Saiyo Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang ?

- 2) Bagaimana Pelaksanaan Program Unit Pengolahan Hasil (UPH) Fermentasi Kakao di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang oleh Kelompok Tani Saiyo ?
- 3) Apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Unit Pengolahan Hasil (UPH) Fermentasi Kakao di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang oleh Kelompok Tani Saiyo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Mendeskripsikan profil Kelompok Tani Saiyo Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
- 2) Menganalisis Pelaksanaan Program Unit Pengolahan Hasil (UPH) Fermentasi Kakao di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang
- 3) Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Unit Pengolahan Hasil (UPH) Fermentasi Kakao di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang oleh Kelompok Tani Saiyo

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan evaluasi dalam Program Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (PPHP)
- 2) Bagi petani agar dapat mengetahui pelaksanaan program yang dijalankan dilingkungan mereka sehingga tujuan dari program Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (PPHP) dapat tercapai
- 3) Bagi peneliti, proses dan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai media pembelajaran dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh.